

PERAN LEMBAGA KEUANGAN INFORMAL TERHADAP PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA INFORMAL

Oleh:

Asis Riat Winanto

Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Titi Rapini

Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

ABSTRAK

Pemberdayaan usaha sektor informal tidak terlepas dari keperluan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi pembiayaan usaha tersebut. Tersedianya kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kredit yang diperoleh dalam melakukan pemupukan modal.

Faktor utama yang menjadi permasalahan pokok bagi para pelaku usaha sector informal adalah masalah yang berkaitan dengan kebutuhan akan pembiayaan, darimana sumber dan lain sebagainya. Diungkapkan bahwa untuk mengatasi masalah pembiayaan ini, masih banyak para pedagang yang cenderung lebih meminjam ke paguyuban, arisan RT, kelompok yasinan, arisan PKK, ataupun kegiatan yang lain. Dengan melakukan pinjaman seperti ini, mereka bisa menambah modal untuk usahanya meskipun tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan, yang artinya adalah mereka mengakui bahwa pembiayaan dengan model ini masih jauh dari harapan atau masih mengalami kekurangan dibandingkan secukupnya adanya keterbatasan dana dari perkumpulan/paguyuban yang diikuti.

Alternatif lain yang biasanya juga dilakukan oleh para pelaku usaha sector informal adalah dengan meminjam kepada "Bank Tithil". Bank Tithil adalah sebutan bagi pinjaman yang dilakukan oleh renteneir. Meskipun dengan bunga yang lebih tinggi dibanding dengan bunga lembaga keuangan formal, tetapi para pelaku usaha sector informal memilih model ini karena menganggap model ini lebih efektif, karena lebih murah, lebih cepat dan tidak ada biaya ekonomi lain yang harus dikeluarkan.

Kata kunci: Lembaga keuangan sector informal, pemberdayaan, kelompok usaha sector informal

PENDAHULUAN

Krisis moneter yang mengguncang iklim usaha (ekonomi) nasional beberapa tahun terakhir semakin menyadarkan

banyak pihak akan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat. Sebuah paradigma pembangunan yang tidak memutlakkan dasar pertumbuhan pada

peran penguasa-penguasa ekonomi, melainkan pada semua pihak terutama pada peran ekonomi rakyat.

Anwar (1997) menjelaskan bahwa paradigma lama pembangunan ekonomi dalam 20 tahun terakhir yang selalu bertumpu pada pertumbuhan tidak mampu lagi dipakai sebagai alat analisis yang jitu guna mencapai sasaran-sasaran yang sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan. Oleh karena itu dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan ekonomi serta kesenjangan sosial. Dalam konteks ini maka perlu diberikan perhatian yang lebih pada upaya untuk membina dan melindungi peran ekonomi rakyat. Sejalan dengan upaya tersebut maka kemampuan dan peranan usaha di sektor informal terus dikembangkan dengan meningkatkan sarana dan prasarana usaha yang disertai dengan pengembangan iklim berusaha yang kondusif termasuk penyederhanaan perizinan, memberikan kemudahan dalam melakukan investasi dan aksesibilitas terhadap barang modal.

Pemberdayaan usaha sektor informal tidak terlepas dari keperluan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi pembiayaan usaha tersebut. Dalam hal ini, upaya pemberdayaan usaha sektor informal mengandung dua aspek penting,

yaitu ketersediaan pembiayaan/ kredit berskala kecil serta kemudahan pemanfaatannya (aksesnya) oleh para pelaku usaha tersebut. Tersedianya kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kredit yang diperoleh dalam melakukan pemupukan modal.

Langkah yang dapat ditempuh dalam hal ini adalah membuka akses masyarakat kepada sumberdaya modal. Untuk itu diperlukan pendekatan yang berbeda dengan cara-cara perbankan konvensional. Aksesibilitas terhadap sumberdaya modal diartikan sebagai keterjangkauan yang harus dimiliki dua sisi, pertama, ada pada saat diperlukan dan, kedua, berada dalam jangkauan untuk memanfaatkannya. Menurut Staley dalam Fatchudin (2002), pembentukan modal merupakan faktor yang penting dan strategis serta menjadi salah satu faktor kunci dalam proses ekonomi. Salah satu tahapan yang harus ditempuh agar proses tersebut dapat berjalan adalah perlunya keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk menggalakkan dan menyalurkan dana kepada usaha mikro. Lembaga keuangan yang diharapkan mampu menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau oleh masyarakat miskin, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM).

Dengan banyaknya macam LKM formal dan informal yang telah ada, maka LKM dalam bentuk yang bagaimana yang sesuai dengan karakteristik masyarakat muslim yang berada pada kelompok usaha mikro. Hal ini dapat dimaklumi, karena LKM formal termasuk perbankan, tidak akan tertarik untuk melayani golongan masyarakat miskin. Karena skala usaha miskin adalah sangat kecil, tidak memiliki badan hukum dan sistem administrasi atau pembukuan, sehingga biaya untuk mencari informasi tentang kelayakan usaha menjadi tinggi. Kiranya pengembangan lembaga keuangan mikro informal sebagai sebuah intitusi yang beroperasi dengan menggunakan mekanisme simpan pinjam dapat dijadikan salah satu pendekatan. Selama ini ada beberapa anggapan mengenai kemampuan kelompok masyarakat miskin bahwa mereka tidak bisa melakukan kegiatan finansial dengan prinsip ekonomi, kegiatan finansial bagi masyarakat kecil merupakan kegiatan recehan yang tidak dapat beroreantasi secara ekonomi dan tidak dapat memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, pemberian jasa finansial bagi masyarakat miskin, terutama penyaluran kredit, lebih dipandang sebagai usaha-usaha sosial yang tidak dapat berjalan dalam prinsip-prinsip ekonomi yang menguntungkan.

Pandangan tersebut kini telah dipatahkan, karena dalam kelompok

masyarakat miskin terdapat potensi akan permintaan jasa finansial mikro yang cukup tinggi antara lain dalam bentuk tabungan, artinya kegiatan finansial dapat dijalankan dengan prinsip ekonomi yang menguntungkan.

Pendekatan institutional sustainability diakui sebagai salah satu pendekatan yang ideal dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan, seperti yang diagendakan pada Microcredit Summit tahun 1997, yaitu bagaimana mencapai lapisan termiskin dari masyarakat, bagaimana menciptakan institutional sustainability, serta bagaimana dampak dari jasa microfinance bagi kehidupan nasabah dan keluarganya. Hal lain yang dilihat adalah dalam LKM yang didirikan tidak hanya untuk memberikan jasa keuangan bagi masyarakat kecil, tetapi terjun dengan isu pemberdayaan, terutama melihat bahwa pembukaan akses kepada jasa keuangan atau permodalan mikro merupakan titik masuk (entry point) untuk kegiatan pemberdayaan yang lain, seperti meningkatkan akses terhadap sumber modal, mengentaskan kemiskinan, memberdayakan perempuan sebagai salah satu penunjang kegiatan ekonomi keluarga. Dengan melihat pernyataan seperti tersebut diatas timbul pertanyaan sejauh mana peran LKM Informal dapat mencapai tujuannya.

Berkaitan dengan peran LKM Informal terhadap nasabahnya serta respon nasabah terhadap sebuah jenis lembaga keuangan mikro maka peneliti melakukan studi yang bertujuan untuk melihat penerapan konsep LKM informal di kelompok usaha yang bersifat informal dan untuk melihat perubahan yang terjadi pada nasabah sebagai akibat dari pinjaman yang diberikan.

Perumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan tersebut diatas maka masalah penelitian akan berkisar pada penelusuran peran LKM Informal dari aspek pelayanan yang ditawarkan yang secara spesifik berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang beroperasi. Adapun perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya pembentukan lembaga keuangan mikro informal ?
2. Bagaimana peran LKM Informal ini dalam meningkatkan pendapatan usaha, apakah ada perubahan yang terjadi pada usaha mereka?

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Ponorogo (Kecamatan Kota) Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, dengan jumlah kelurahan sebanyak 19 (sembilan belas) kelurahan. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah disamping lokasi proyek P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan terletak di daerah

perkotaan (Kecamatan Kota) juga mempertimbangkan bahwa proyek P2KP tersebut masuk ke Kabupaten Ponorogo baru mulai tahun 2005. Kelurahan lokasi penelitian dimaksud adalah Kelurahan Tamanarum, Pakunden, Paju, Brotonegaran, Kauman, Kapatihan, Surodikraman, Purbosuman, Tonatan, Nologaten, Banyudono, Mangkujayan, Cokromenggalan, Keniten, Beduri, Jengglong, Tambakbayan, Bangunsari, dan Pinggirsari.

Responden dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan yang ada masing-masing kelurahan. Untuk menggali data dilakukan wawancara secara langsung dengan responden yang dipandu dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan. Jenis pertanyaan yang diajukan dalam angket atau kuesioner adalah jenis pertanyaan "*tertutup*", yaitu angket yang dirancang sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan yang dialami oleh responden sendiri, kemudian semua alternatif jawaban yang harus dijawab responden telah tertera dalam angket tersebut, dan jenis pertanyaan "*terbuka*", yaitu daftar pertanyaan yang dibuat dengan sepenuhnya memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab tentang keadaan yang dialami sendiri, tanpa adanya alternatif jawaban dari peneliti (Burhan Bungis; 2005).

Disamping itu, juga dibutuhkan data sekunder yang ada di masing-masing kantor BKM maupun kantor kelurahan sebagai data pendukung dan melengkapi penelitian ini.

Penelitian ini bersifat eksploratif sehingga dalam melakukan analisis data menggunakan metode "*Analisis Deskriptif*", yaitu bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut (Burhan Bungis; 2005). Tampilan data hasil penelitian yang berupa angka-angka, gambar atau tabel akan dilakukan analisis secara deskriptif, yaitu dengan memberikan uraian-uraian atau penjelasan-penjelasan sehingga mampu memberikan gambaran secara riil tentang kondisi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Rencana awal dalam penelitian ini akan akan meneliti seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Ponorogo atau Kecamatan Kota. Namun setelah melakukan penggalian data di lapangan ternyata menghadapi beberapa kendala, baik berupa ketidaksediaan dari pihak terkait untuk diteliti, masalah administrasi yang harus dipenuhi, maupun sudah tidak

adanya data karena terkena bencana banjir pada tahun 2007, maka jumlah kelurahan yang dapat atau bersedia untuk dilakukan penelitian adalah sebanyak 16 (enam belas) kelurahan.

Gambaran secara singkat kondisi kelurahan sebagai lokasi penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Jumlah kelurahan sebagai lokasi penelitian sebanyak 16 kelurahan, yaitu Kelurahan Mangkujayan, Jingglong, Banyudono, Tambakbayan, Bangunsari, Nologaten, Pinggirsari, Keniten, Cokromenggalan, Surodikraman, Pakunden, Purbosuman, Tamanarum, Brotonegaran, Tonatan, dan Kepatihan; 2) Kelurahan lokasi penelitian yang mempunyai penduduk terbanyak adalah Kelurahan Keniten dengan jumlah penduduk sebanyak 8.892 jiwa yang terbagi sebanyak 4.449 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 4.443 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan kelurahan yang mempunyai penduduk paling sedikit adalah Kelurahan Tamanarum dengan jumlah penduduk sebanyak 1.221 jiwa yang terbagi sebanyak 579 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 642 jiwa penduduk perempuan; 3) Kelurahan yang mempunyai lebih banyak jumlah penduduk laki-laki dibandingkan jumlah penduduk perempuan adalah Kelurahan Pinggirsari, Tambakbayan, Cokromenggalan, Brotonegaran, Nologaten, Purbosuman, Tonatan, Mangkujayan, dan Keniten.

Sedangkan kelurahan yang mempunyai lebih banyak jumlah penduduk perempuan dibandingkan jumlah penduduk laki-laki adalah Kelurahan Tamanarum, Jingglong, Pakunden, Kepatihan, Bangunsari, Banyudono, dan Surodikraman; 4) Kelurahan yang mempunyai jumlah kepala keluarga (KK) terbanyak adalah Kelurahan Mangkujayan, yaitu sebanyak 2.247 KK dan kelurahan yang paling sedikit jumlah kepala keluarga (KK) adalah Kelurahan Jingglong , yaitu sebanyak 391 KK; dan 5) Kelurahan yang mempunyai jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) terbanyak adalah Kelurahan Keniten, yaitu sebanyak 14 RW dan 48 RT. Sedangkan kelurahan yang paling sedikit mempunyai Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) adalah Kelurahan Jingglong , yaitu sebanyak 2 RW dan 7 RT.

Terkait dengan jenis kegiatan fisik yang dilaksanakan dalam Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan, secara umum jenis kegiatan fisik yang dilaksanakan di masing-masing kelurahan lokasi program antara lain adalah perbaikan jalan, perbaikan prasarana perumahan masyarakat, perbaikan drainase, pembuatan sarana MCK, penyediaan air bersih (non pipa), pembuatan sarana persampahan, pembuatan saluran pembuangan limbah, jembatan, sarana penerangan, dan lain-lain.

Pelaksanaan Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya jenis kegiatan fisik, mampu mendorong masyarakat untuk melakukan swadaya guna memperlancar proses pelaksanaan kegiatan dimaksud. Berbagai jenis kegiatan fisik tersebut antara lain adalah perbaikan jalan, perbaikan prasarana perumahan masyarakat, perbaikan drainase, pembuatan sarana MCK, penyediaan air bersih (non pipa), pembuatan sarana persampahan, pembuatan saluran pembuangan limbah, jembatan, sarana penerangan, dan lain-lain.

Pembahasan Hasil Penelitian

Bentuk swadaya masyarakat untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan fisik yang Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan adalah berupa tenaga kerja, konsumsi, dan berupa iuran dana (rupiah). Semua bentuk swadaya tersebut kemudian “dirupiahkan” sebagaimana yang telah tertuang dalam proposal pengajuan dana kegiatan fisik. Proses pengajuan usulan kegiatan dan penggalian swadaya masyarakat secara umum dimulai dari musyawarah masing-masing Rukun Tetangga (RT) setelah mendapatkan sosialisasi Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat kelurahan. Musyawarah di tingkat Rukun Tetangga (RT) tersebut biasanya untuk merumuskan usulan kegiatan dan menentukan serta menyepakati bentuk

dan besarnya swadaya masyarakat yang diberikan untuk mendukung kegiatan fisik. Swadaya masyarakat tersebut cukup penting karena dana program sering tidak mencukupi untuk menutup seluruh biaya kegiatan fisik yang diusulkan.

Besarnya prosentase swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan cukup bervariasi, yaitu mulai sekitar 14,29% sampai dengan 34,12% dari total dana kegiatan. Gambaran prosentase swadaya masyarakat dari kegiatan fisik berupa perbaikan jalan, perbaikan prasarana perumahan masyarakat, perbaikan drainase, pembuatan sarana MCK, penyediaan air bersih (non pipa), pembuatan sarana persampahan, pembuatan saluran pembuangan limbah, jembatan, dan sarana penerangan.

Kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan untuk perbaikan jalan mampu menyerap swadaya masyarakat sebesar 20,60% dari total dana kegiatan, untuk perbaikan prasarana perumahan masyarakat mampu menyerap sebesar 24,50% dari total dana kegiatan, untuk perbaikan drainase mampu menyerap sebesar 25,84% dari total dana kegiatan, untuk pembuatan sarana MCK mampu menyerap sebesar 22,57% dari total dana kegiatan, untuk penyediaan air bersih (non pipa) mampu menyerap sebesar 26,45% dari total dana kegiatan,

untuk pembuatan sarana persampahan mampu menyerap sebesar 21,49% dari total dana kegiatan, untuk pembuatan saluran pembuangan limbah mampu menyerap sebesar 23,13% dari total dana kegiatan, untuk perbaikan jembatan mampu menyerap sebesar 34,12% dari total dana kegiatan, dan untuk sarana penerangan mampu menyerap sebesar 14,29% dari total dana kegiatan. Secara rata-rata besarnya prosentase swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebesar 23,67% dari total dana kegiatan.

Penyerapan swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan tidak selalu berjalan dengan lancar. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam penyerapan swadaya masyarakat antara lain adalah : 1) Tingkat penghasilan atau kesejahteraan warga yang berbeda-beda antara Rukun Tetangga (RT) satu dengan Rukun Tetangga (RT) yang lain, sehingga menyebabkan perbedaan besarnya swadaya masyarakat yang dapat diserap, khususnya swadaya dalam bentuk tunai (rupiah); 2) Tingkat penghasilan atau kesejahteraan warga yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan adanya berbagai bentuk swadaya masyarakat, yaitu tidak selalu berbentuk tunai (rupiah); 3) Tidak semua wilayah mempunyai warga mampu yang sering sebagai warga "jujungan" jika

swadaya masyarakat yang terkumpul masih kurang dan mereka bersedia untuk menutupinya (donator besar).

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan di dalam musyawarah kelurahan dan biasanya diambil kesepakatan bagi warga yang mampu dapat memberikan swadaya dalam bentuk tunai (rupiah) atau konsumsi, dan bagi warga yang kurang mampu dapat memberikan swadaya dengan menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan fisik yang mereka usulkan. Dalam hal ini, musyawarah warga menjadi kata kunci yang penting untuk menyelesaikan segala permasalahan yang biasanya muncul dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan fisik.

Berbagai manfaat sangat dirasakan oleh masyarakat penerima program Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya dengan tersedianya sarana dan prasarana fisik, yaitu mulai dari jalan di lingkungan mereka semakin baik dan tidak becek, khusus untuk masyarakat kurang mampu telah dibantu perbaikan rumah yang layak, tersedianya drainase, sarana MCK yang memadai, tersedianya air bersih (non pipa), tersedianya sarana persampahan, tersedianya saluran pembuangan limbah, jembatan yang semakin baik, dan sarana penerangan yang semakin baik.

Sarana dan prasarana fisik yang telah dilaksanakan melalui Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan sampai saat ini masih mampu terjaga dengan baik, mulai tingkat kebersihan sampai dengan perbaikan kerusakannya. Hal ini dikarenakan masyarakat setempat sejak awal (tahap perencanaan) dan tahap pelaksanaan kegiatan sudah terlibat dengan aktif dengan memberikan swadaya, baik dalam bentuk tenaga, waktu, dan biaya, sehingga untuk pelestarian program mereka juga melaksanakan dengan baik dan mereka merasa ikut memilikinya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa partisipasi masyarakat setempat. Bantuan yang digulirkan dalam Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya untuk kegiatan fisik telah mampu mendorong masyarakat untuk memberikan swadaya baik dalam bentuk iuran tunai (rupiah), tenaga kerja, dan konsumsi. Secara rata-rata prosentase besarnya swadaya masyarakat yang mampu diserap untuk mendukung kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan sebesar 23,67% dari total dana kegiatan.

Berbagai jenis kegiatan fisik yang dilaksanakan dalam Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan antara lain

adalah perbaikan jalan, perbaikan prasarana perumahan masyarakat, perbaikan drainase, pembuatan sarana MCK, penyediaan air bersih (non pipa), pembuatan sarana persampahan, pembuatan saluran pembuangan limbah, jembatan, dan sarana penerangan.

Penyerapan swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan tidak selalu berjalan dengan lancar. Berbagai permasalahan atau kendala dapat diselesaikan di dalam musyawarah kelurahan. Dalam hal ini, musyawarah warga menjadi kata kunci yang penting untuk menyelesaikan segala permasalahan atau kendala yang ada.

Penelitian ini menggunakan wawancara secara terstruktur (kuesioner yang telah disiapkan) untuk menggali data yang ada di masing-masing kelurahan lokasi Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan dan yang menjadi responden adalah pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), sehingga data yang diperoleh masih banyak berbentuk data kuantitatif yang mencerminkan besarnya swadaya masyarakat. Oleh sebab itu, untuk peneliti selanjutnya, khususnya dalam bidang terkait, disarankan untuk lebih banyak menggali data dan informasi tidak hanya pada pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), tetapi

langsung kepada masyarakat secara umum yang telah memberikan swadaya untuk mendukung pelaksanaan program, sehingga akan dapat digali data dan informasi yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Burhan Bungis, 2005, "Metodologi Penelitian Kuantitatif", Penerbit Prenada Media, Jakarta.

Riza Primahendra, 2006, "Cummunity Development : Sebuah Eksplorasi" Info URDI Volume 16, dalam www.urdi.org.

_____, 2004, "Pedoman Umum P2KP", Edisi Revisi September 2004, Penerbit Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta.

_____, 2004, "Modul Lokalatih Aparat Pemda Kabupaten Ponorogo : P2KP-II", tanggal 20 sampai dengan 24 Desember 2004, di Hotel Tlogo Mas, Ngebel, Ponorogo.